

Pengaruh Perencanaan Penganggaran dan Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Penyerapan Anggaran

¹Tiara Syifa Putri Ananda, ²Maria Maria, ³Yuliana Sari

¹²³Politeknik Negeri Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia

tiarasypa26@gmail.com

mariamardjuki@polsri.ac.id

yuliana_sari@polsri.ac.id

Abstract

The process of creating a budget is called budgeting. An efficient budget is one that generates measurable results, and can be distributed evenly. Without funding, a government activity or program cannot operate, therefore efficient budget absorption is crucial. This study was conducted to determine the effect of budgeting planning and competence of government officials at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) Palembang City. This study uses questionnaires as part of its quantitative data collection methods. The results of the study show that the Palembang City BPKAD's budget absorption is influenced by both budgeting planning and the skill of government personnel.

Keywords: *Planning; Apparatus Competence; Budget Absorption.*

Abstrak

Penganggaran adalah proses penyusunan anggaran. Anggaran yang baik adalah anggaran yang dapat terserap secara merata dan menghasilkan *output* yang nyata. Suatu kegiatan/program pemerintah tidak akan berjalan jika tidak ada dalam anggaran dan serapan anggaran yang optimal merupakan hal penting. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui pengaruh dari perencanaan penganggaran dan kompetensi aparatur pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil kajian menunjukkan perencanaan penganggaran dan kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada BPKAD Kota Palembang.

Kata kunci: Perencanaan; Kompetensi Aparatur; Penyerapan Anggaran

PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 pandemi covid-19 melanda Indonesia, dampak dari pandemi tersebut tidak hanya ada pada bidang kesehatan tetapi juga perekonomian. Perekonomian mengalami penurunan yang sangat drastis hal ini menyebabkan pemerintah mengambil tindakan untuk melakukan realokasi anggaran atau pergeseran anggaran pada APBN maupun APBD. Oleh karena itu, mengelola keuangan daerah dengan baik merupakan kewajiban pemerintah daerah guna menaikkan kualitas kesejahteraan dan kehidupan masyarakat. Penyerapan anggaran yang rendah disebabkan karena belum mampunya pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri. Permasalahan utama dalam penganggaran pemerintah daerah adalah penyerapan anggaran dan ketidaksesuaian dengan tujuan (Zulaikah & Burhany, 2019).

Pada akhir tahun 2021, anggaran sebesar Rp226 triliun tidak terserap oleh pemerintah daerah Indonesia (Avisena, 2021). Jika target penyerapan anggaran tidak terpenuhi, dana yang dialokasikan tidak akan terserap sepenuhnya dan jika dana yang dibiarkan menganggur akan berdampak pada manfaat belanja. Kegiatan ekonomi produktif sebaiknya mendapatkan alokasi belanja yang dilakukan setiap tahun oleh pemerintah agar benar-benar mendapatkan manfaatnya (Isyandi & Trihatmoko, 2022).

Pemerintah kota Palembang merupakan salah satu pemerintah daerah dengan penyerapan anggaran yang rendah, dan menurut laporan APBD 2021 pada triwulan 4 semester 2 penyerapan

anggaran masih 59% (Apriani, 2021). Salah satu perangkat daerah yang mengalami fenomena penyerapan anggaran belum optimal adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang. Berlandaskan transformasi Renstra BPKAD Kota Palembang tahun 2019-2023 sebagian kasus terkait penyerapan anggaran antara lain, belum optimalnya pemakaian Satuan Standar Harga Benda serta Jasa, belum diterapkannya analisis standar belanja dalam penataan anggaran, belum terdapatnya hasil penilaian penunjuk kinerja selaku input perencanaan tahun selanjutnya, sulitnya merumuskan penunjuk kinerja dalam pelaksanaan sistem penganggaran berbasis kinerja serta terjadinya penimbunan anggaran di triwulan IV (BPKAD, 2020). Melambatnya penyerapan anggaran menimbulkan penimbunan anggaran pada triwulan terakhir dan memunculkan ancaman akuntabilitas keuangan negara seperti memaksakan kehendak yang tidak dibutuhkan serta menyusutnya mutu pelaksanaan anggaran.

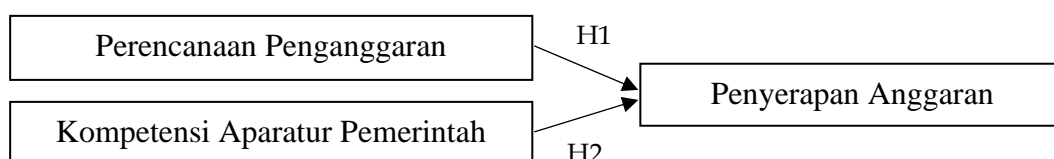
Teori *stewardship* (Donaldson & Davis, 1991), suatu perilaku sikap melayani, yang mana kepentingan pribadi diganti/disejajarkan untuk melayani kepentingan umum. Teori ini dapat menjelaskan tanggung jawab pemerintah untuk mengelola anggaran dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan karena penyerapan anggaran akan berdampak langsung pada masyarakat. Pemerintah wajib melaporkan data sebagai sikap akuntabilitas publik dalam mengelola dan menyerap anggaran yang ada. Penyerapan anggaran dapat ditinjau dari perencanaan penganggaran. Yuliani (2020) dan Zarinah et al (2016) menyatakan, perencanaan penganggaran memiliki pengaruh pada serapan anggaran. Harahap, et al (2020) meneliti penyerapan anggaran dari aspek kompetensi aparatur pemerintah.

Perencanaan penganggaran merupakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan. Penganggaran mengacu pada sebuah daftar belanja serta penerimaan yang direncanakan untuk dicapai agar persyaratan segala pengeluaran yang dibutuhkan dapat dipenuhi dalam jangka waktu tertentu. Bagi pemerintah melakukan proses penganggaran merupakan sebuah tugas yang sulit (Arora & Talwar, 2020). Apabila penganggaran direncanakan dengan cermat untuk memaksimalkan anggaran yang tersedia, maka dapat berkontribusi pada keberhasilan program kegiatan organisasi yang direncanakan dan penyerapan anggaran menjadi baik. Riset oleh Agus (2016) menyatakan kalau perencanaan penganggaran bisa mempengaruhi tingkat serapan anggaran, serupa dengan riset Zarinah et al (2016) dan Elim et al (2018). Hasil lain ditunjukkan oleh Rifai et al (2016), bahwa perencanaan penganggaran tidak memeengaruhi penyerapan anggaran. Hipotesis pertama dari kajian ini adalah:

H1: Perencanaan penganggaran memengaruhi penyerapan anggaran.

Kemampuan atau kompetensi adalah salah satu aset dasar pekerjaan. Semakin mahir seseorang melakukan pekerjaan, maka semakin mahir pula dalam menyelesaikan pekerjaan. Kendala lain adalah kurangnya kemampuan. Jika tidak berkompeten di bidang kegiatan, maka hasil dari pekerjaan yang dilakukan tidak akan optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara harus memiliki kompetensi. Pengelola keuangan yang mendapat tugas harus menguasai kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaannya. Kompetensi tersebut dapat berupa tata kelola keuangan, pemahaman mengenai kebijakan, dan petunjuk pelaksanaan. Herryanto (2012), menyatakan kompetensi SDM memengaruhi serapan anggaran. Namun, hal ini tidak sama dengan temuan Ramadhani & Setiawan (2019) yang menyebutkan kompetensi SDM tidak memiliki pengaruh pada serapan anggaran. Hipotesis kedua dari kajian ini adalah:

H2: Kompetensi SDM memengaruhi tingkat penyerapan anggaran.



Gambar 1. Konsep Penelitian.

Kesenjangan hasil kajian sebelumnya tentang komponen-komponen yang memengaruhi serapan anggaran ditambah dengan fakta yang ada, memotivasi penulis untuk mengkaji serapan anggaran yang ada di BPKAD Kota Palembang. Oleh karena itu, mengetahui perencanaan penganggaran dan kompetensi aparatur pemerintah pada penyerapan anggaran secara parsial ataupun simultan di BPKAD Kota Palembang menjadi tujuan dari kajian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang bisa diwujudkan dengan menggunakan prosedur atau pengukuran (Sujarweni & Utami, 2019). Sampel dalam kajian ini menggunakan sampel jenuh. PPK, PPTK, Bendahara, Bidang Sekretariat, Bidang Penganggaran, Bidang Akuntansi, dan Bidang Aset pada BPKAD Kota Palembang merupakan responden kajian ini dengan total 51 responden. Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk memperoleh data yang diinginkan dan disebarkan kepada pengelola anggaran BPKAD Kota Palembang dengan total pertanyaan 25 item menggunakan skala likert 5 item pada kuesioner.

Perencanaan penganggaran, kompetensi aparatur pemerintah, serta penyerapan anggaran diukur menggunakan indikator yang diambil dari Herryanto (2012), Zarinah et al (2016), dan Dewi et al (2017). Setelah kuesioner terkumpul maka data dianalisis berbantuan program SPSS IBM versi 25 dengan teknik analisis regresi linier berganda. Berikut adalah model analisis regresi linier berganda yang digunakan.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- Y = Penyerapan Anggaran
- X₁ = Perencanaan Penganggaran
- X₂ = Kompetensi Aparatur Pemerintah
- a = Konstanta
- b₁, b₂ = Koefisien Regresi
- e = *Error*

Variabel penelitian memakai *independent variable* dan *dependent variable*.

- a) Variabel Independen
Perencanaan penganggaran (X₁) menggunakan 9 indikator dan kompetensi aparatur pemerintah (X₂) sebanyak 8 indikator.
- b) Variabel Dependen
Penyerapan anggaran (Y) menggunakan 8 indikator.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kuesioner yang tersebar ke responden berhasil dikembalikan sebesar 100%. Data rekapitulasi karakteristik responden pada BPKAD Kota Palembang menunjukkan jumlah pria 53% dan wanita 47%. Hal ini membuktikan telah terjadi kesetaraan gender. Tingkat pendidikan rata-rata berada pada jenjang S1 dan S2 masing-masing (47% dan 41%), sisanya SLTA dan D3 (12%).

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
Asymp. Sig. (2-tailed)	,200 ^{c,d}

Sumber: Data diolah (2022).

Berdasarkan hasil uji normalitas nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0, 200 nilai tersebut > 0,05 hal ini membuktikan bahwa data telah berdistribusi normal.

Uji multikolonieritas dilihat dari besarnya nilai VIF dan tolerance apabila nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10, maka model tidak terjadi masalah multikolonieritas.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Perencanaan Penganggaran	1,000	1,000	Bebas Multikolonieritas
Kompetensi Aparatur Pemerintah	1,000	1,000	

Sumber: Data diolah (2022).

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas nilai tolerance dan VIF masing-masing variabel adalah 1,000 yang mana nilai tolerance dari perencanaan penganggaran dan kompetensi aparatur pemerintah $1 > 0,01$ dan nilai VIF $1 < 10$. Hal ini membuktikan data bebas dari masalah multikolonieritas.

Uji asumsi klasik ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Guna menguji model regresi apakah terjadi perbedaan varians dan residual maka dilakukan dengan uji heteroskedastisitas. Jika nilai sig di atas tingkat kepercayaan 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji glejser.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4,391	6,011		0,731	0,469
Perencanaan Penganggaran (X ₁)	0,099	0,109	0,129	0,914	0,365
Kompetensi Aparatur Pemerintah (X ₂)	-0,147	0,123	-0,169	-1,196	0,237

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: Data diolah (2022).

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas nilai sig perencanaan penganggaran sebesar 0,365 dan kompetensi aparatur pemerintah sebesar 0,237. Keduanya, diatas 0,05 maka hasil ini membuktikan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4. Hasil Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-14,795	10,055		-1,471	0,148
Perencanaan Penganggaran (X ₁)	0,463	0,182	0,300	2,548	0,014
Kompetensi Aparatur Pemerintah (X ₂)	0,851	0,205	0,488	4,145	0,000
Sig. F	0,000				

Sumber: Data diolah (2022).

Model regresi linier berganda penelitian ini adalah sebagai berikut;

$$Y = -14,795 + 0,463 X_1 + 0,851 X_2 + e$$

Dari persamaan tersebut konstanta (a) = -14,795 menunjukkan nilai konstan, yang mana bila nilai variabel independen sama dengan nol, maka variabel penyerapan anggaran sama dengan -14,795. Koefisien X₁ = 0,463 memiliki arti bahwa variabel perencanaan penganggaran mempunyai arah pengaruh positif terhadap penyerapan anggaran, dimana jika variabel lain nilainya tetap dan variabel perencanaan penganggaran naik satu satuan maka, penyerapan anggaran akan meningkat sebesar sebesar 46,3%. Koefisien X₂ = 0,851 memiliki arti bahwa kompetensi aparatur pemerintah memiliki arah pengaruh positif terhadap penyerapan anggaran dimana jika variabel lain nilainya tetap dan variabel kompetensi aparatur pemerintah naik satu satuan maka, penyerapan anggaran akan meningkat sebesar 85,1%.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,578 ^a	0,334	0,307	4,573

Sumber: Data diolah (2022).

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai R Square sebesar 0,334 atau dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran dipengaruhi 33,4% oleh perencanaan penganggaran dan kompetensi aparatur pemerintah.

Pembahasan

Perencanaan Penganggaran memiliki nilai signifikan $0,014 < 0,05$ yang berarti bahwa perencanaan penganggaran berpengaruh positif signifikan pada penyerapan anggaran pada BPKAD Kota Palembang. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik perencanaan yang dibuat maka semakin baik juga penyerapan anggarannya. Dengan demikian, **H1 diterima**. Perencanaan penganggaran diukur dengan dimensi akurasi data, perencanaan dan kebutuhan, serta pengesahan APBD. Berdasarkan jawaban responden pada kuesioner yang disebar, BPKAD Kota Palembang telah membuat perencanaan penganggaran dengan baik.

Item pertanyaan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dengan rata-rata jawaban sangat setuju (72,5%), telah memperhitungkan biaya yang dibutuhkan untuk target pembangunan (58,8%), merumuskan tujuan serta sasaran (55,8%) dan merencanakan berbagai program sesuai dengan biaya yang tersedia (66,7%), telah menyusun rencana pendapatan dan belanja serta biaya untuk suatu kegiatan (56,9%), telah mengalokasikan dana program yang disusun (49%). Namun, BPKAD Kota Palembang untuk rencana kegiatan masih belum melengkapi data pendukung jika dilihat dari rata-rata jawaban sangat setuju (64,7%), banyaknya anggaran kegiatan yang diblokir dengan rata-rata jawaban sangat setuju (52,9%), dan waktu yang digunakan untuk penyusunan dan penelaahan anggaran terlalu singkat dengan rata-rata jawaban sangat setuju (58,8%).

Secara teori, anggaran yang sudah dibuat harus dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan. Anggaran yang baik harus dikelola secara efektif dan efisien untuk itu diperlukan perencanaan penganggaran. Teori *stewardship* menggambarkan bahwa BPKAD Kota Palembang sebagai *steward* yang dipercayakan masyarakat untuk mengelola dana yang ada telah menyusun perencanaan penganggaran sesuai dengan prioritas kegiatan. Hasil kajian ini memiliki arti bahwa dengan semakin baiknya perencanaan anggaran yang dibuat, begitu pula serapan anggaran yang akan semakin baik. Hal ini sama dengan kajian Nugroho & Alfarisi (2017) dan Elim et al (2018) yang menjelaskan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh pada serapan anggaran.

Kompetensi Aparatur Pemerintah memiliki nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang berarti kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran pada BPKAD Kota Palembang. Hal ini menunjukkan semakin baiknya penyerapan anggaran, maka kompetensi aparatur yang melakukan pengelolaan anggaran juga baik. Dengan demikian **H2 diterima**. Kompetensi aparatur pemerintah diukur dengan dimensi keterampilan, skill, dan pengetahuan. BPKAD Kota Palembang telah memiliki aparatur yang kompeten jika dilihat dari rata-rata jawaban responden menjawab setuju di setiap point pertanyaan.

Poin pertanyaan memiliki kemampuan penguasaan teknis operasional dengan rata-rata jawaban setuju (70,6%), memiliki kemampuan pegawai dalam memproses pengelolaan anggaran sebesar (74,5%), memiliki disiplin dengan rata-rata jawaban setuju (68,8%), mampu bekerjasama (60,8%), bertanggungjawab terhadap pekerjaan (62,7%), memiliki daya pikir kritis (54,9%), dan menguasai ilmu terkait bidang pekerjaan secara luas dengan rata-rata jawaban setuju (54,9%). Namun, aparatur BPKAD Kota Palembang masih memiliki kebiasaan menunda pekerjaan hal ini dibuktikan dengan rata-rata jawaban responden setuju (43,1%).

Secara teori kompetensi aparatur pemerintah merupakan kunci bagi suatu organisasi untuk melakukan kegiatan guna mewujudkan tujuan yang ingin dicapai organisasi pemerintahan. Pemerintah sebagai aparatur pengelola keuangan berfungsi untuk mewujudkan praktik penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Teori *stewardship* menggambarkan BPKAD Kota Palembang sebagai *steward* yang dipercayakan masyarakat telah memiliki keahlian dan keterampilan sinkron antara bidang keahlian dengan bidang pekerjaannya. Harahap et al (2020)

dan Dewi et al (2017) menyebutkan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh pada serapan, hasil kajian tersebut sejalan dengan hasil kajian ini.

SIMPULAN

Perencanaan penganggaran memiliki pengaruh positif signifikan pada penyerapan anggaran. Kompetensi aparatur pemerintah memiliki pengaruh positif signifikan pada penyerapan anggaran. Baik secara parsial maupun simultan perencanaan penganggaran dan kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dengan kontribusi sebesar 33,4% sedangkan 66,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada kajian ini. Keterbatasan penelitian ini adalah lamanya waktu pengurusan surat izin penyebaran data. BPKAD disarankan untuk melengkapi data pendukung guna merencanakan suatu kegiatan, menyusun anggaran sesuai dengan skala prioritas, dan memperhitungkan waktu penyusunan anggaran agar lebih efisien dan tepat waktu, juga meningkatkan disiplin waktu untuk setiap aparatur pengelolaan keuangan. Diharapkan untuk kajian selanjutnya dapat memperluas objek wilayah studi dan memakai komponen lain seperti perubahan anggaran, dokumen pengadaan, pelaksanaan anggaran, dan pemahaman. Selain itu, peneliti berikutnya dianjurkan untuk menambahkan prosedur wawancara untuk mendukung informasi kuesioner agar penelitian lebih jelas dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, K. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Binjai Dengan Perubahan Anggaran Sebagai Variabel Moderating* (Vol. 1, Issue 3) [Tesis]. Universitas Sumatera Utara.
- Apriani, D. (2021). *Serapan APBD Kota Palembang Masih Minim*. Mediaindonesia.Com. <https://mediaindonesia.com/nusantara/449488/serapan-apbd-kota-palembang-masih-minim>
- Arora, N., & Talwar, S. J. (2020). Modelling efficiency in budget allocations for Indian states using window based non-radial non-concave metafrontier data envelopment analysis. *Socio-Economic Planning Sciences*, 70, 100735. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2019.100735>
- Avisena, M. I. R. (2021). *Lambatnya Belanja APBD Jadi Perhatian Serius Kemenkeu*. Mediaindonesia.Com. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/449512/lambatnya-belanja-apbd-jadi-perhatian-serius-kemenkeu>
- BPKAD. (2020). *RENSTRA BPKAD KOTA PALEMBANG*. E-Sakippalembang.Go.Id. <https://esakip.palembang.go.id/1923/dokumen/105/2021/2b374576360828604c4faaf9362f642d.pdf>
- Dewi, N., Dwirandra, A. A. N. B., & Made, W. (2017). Kemampuan Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kompetensi SDM Pada Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 4(6), 1609–1638.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Elim, M. A., Ndaparoka, D. S., David, T. E., Akuntansi, J., & Negeri, P. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Audit*, 3(2), 46–56.
- Harahap, S. A. S., Taufik, T., & Nurazlina. (2020). Pengaruh perencanaan anggaran, Pelaksanaan anggaran, Pencatatan administrasi dan Kompetensi sumber daya manusia terhadap tingkat penyerapan anggaran (studi empiris pada OPD Kota Dumai). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(1), 1–10.
- Herryanto, H. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta* [Tesis]. Universitas Indonesia.

- Isyandi, B., & Trihatmoko, R. A. (2022). An Analysis of Regional Economic Performance of Riau on the Capital Expenditure Budget: A Study of Indonesian Territorial Economics. *International Journal of Public Policy and Administration Research*, 9(2), 33–45. <https://doi.org/10.18488/74.v9i2.3024>
- Nugroho, R., & Alfarisi, S. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Melonjaknya Penyerapan Anggaran Quartal IV Instansi Pemerintah (Studi pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan). *Jurnal BPPK*, 1(1), 22–37. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/jurnalbppk/article/view/23/95>
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.
- Ramadhani, R., & Setiawan, M. A. (2019). Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia Dan Pengadaan Barang/ Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada OPD Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 710–726. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i2.104>
- Rifai, A., Inapty, A. B., & Pancawati, M. S. R. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Daya Serap Anggaran (Studi Empiris pada SKPD Pemprov NTB). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 11(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JIAB.2016.v11.i01.p01>
- Sujarweni, W. v., & Utami, R. L. (2019). *THE MASTER BOOK OF SPSS Pintar Mengolah Data Statistik untuk Segala Keperluan Secara Otodidak* (S. Adams, Ed.; Cetakan Pertama). STARTUP.
- Yuliani, V. (2020). *Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Triwulan IV Tahun 2019 pada UPTD Puskesmas di Kabupaten Tegal* [Skripsi]. Universitas Pancasakti Tegal.
- Zarinah, M., Darwanis, & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kualias Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Aceh Utara. *Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(1), 90–97.
- Zulaikah, B., & Burhany, D. I. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penumpukan Penyerapan Anggaran Pada Triwulan IV Di Kota Cimahi. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 1221–1234. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/proceeding/article/view/1450/1211>